



Kajian Budaya Universitas Udayana  
Kajian Budaya & Media UGM Yogyakarta

## SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

*Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A.*

Sebagai Penyaji Seminar Bersama

**Pendekatan Lintas Disiplin dalam Kajian Budaya:**

Praktik dan Tantangannya dalam Masyarakat Kontemporer

Pada tanggal 4 Mei 2017

di Program Studi Kajian Budaya dan Media,

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Ketua Program Studi Kajian Budaya dan Media

Prof. Dr. Heru Nugroho

NIP. 19590109 198703 1 002



## KAJIAN BUDAYA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA<sup>1</sup>

I Ketut Ardhana<sup>2</sup>  
[phejepsdrlipt@yahoo.com](mailto:phejepsdrlipt@yahoo.com)

### Abstrak

*Kajian Budaya muncul sebagai bidang ilmu sebagai reaksi atas kegagalan ilmu-ilmu yang positivistik dalam mencari solusi terhadap isu-isu yang berkembang di era postmodernisme. Ada sebuah keinginan yang diharapkan dari perkembangan studi kajian budaya ini terutama mengingat sejak diintroduksikannya era otonomi daerah pada tahun 2001. Muncul pertanyaan sekitar relasi Kajian Budaya dan dampak dari diimplementasikannya konsep otonomi daerah itu. Ini terlihat dari adanya kewenangan yang semakin meningkat di tingkat kabupaten dan kota yang bergulir seiring dengan pemekaran wilayah, dimana figur-figur yang muncul berkaitan dengan konsep "putra daerah" ("son of the soil"). Pertama: Bagaimana Kajian Budaya menyiasati perkembangan di era postmodernisme. Kedua: Apa hubungan antara Kajian Budaya dan perkembangan kabupaten dan kota. Ketiga: Bagaimana pemerhati Kajian Budaya dapat menerapkan pendekatannya dalam masalah-masalah marginalisasi, hegemonisasi, ketertinggalan, dan keterbelakangan yang menjadi isu-isu sentral dan menjadi karakteristik dari Kajian Budaya ini. Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam makalah ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dari studi Kajian Budaya dalam konteks pembangunan kabupaten dan kota, serta untuk melihat arah, peluang, dan tantangannya yang dihadapi pada masa kini, dan masa yang akan datang.*

*Kata Kunci: kajian budaya, budaya lokal, kabupaten, dan kota.*

### I. Pendahuluan

Kegiatan kolaborasi dalam bentuk pelaksanaan seminar nasional ini antara Program Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Bali dan Program Doktor Kajian Budaya dan Media Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dimaksudkan untuk tukar pengalaman (*sharing ideas*) dalam pengelolaan program ini. Tujuan kegiatan seminar ini diharapkan dapat mengkaji perbandingan serta melihat interkoneksitasnya secara komprehensif, berkaitan dengan

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang, "Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Budaya" yang dilaksanakan oleh Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana yang bekerjasama dengan Program Doktor Kajian Budaya dan Media yang dilaksanakan di Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017.

<sup>2</sup> Guru Besar Sejarah Asia dan Ketua Program Doktor Kajian Budaya (S3) pada Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Udayana, Denpasar Bali.

isu-isu Kajian Budaya dewasa ini, diantaranya membahas arah, tantangan, dan peluangnya di masa depan.

Program Kajian Budaya di Universitas Udayana di Bali ini sudah berkembang sejak tahun 1990-an, dengan inisiatornya, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus<sup>3</sup> seorang antropolog dan tokoh budayawan Bali yang mumpuni. Bagi kalangan akademisi Bali, tentu nama I Gusti Ngurah Bagus yang sering disebut Ngurah Bagus tidaklah asing lagi, karena selain sebagai seorang mentor di bidang kebudayaan, ia dianggap juga sebagai figur yang memiliki kepemimpinan yang kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Bali sebagai dampak negatif dari program pembangunan ("*development*") yang dilakukan di masa lalu.

Persoalan-persoalan yang terjadi ini, tentu tidak dapat dipisahkan dari dinamika panjang sejarah masyarakat dan budaya Bali di masa lalu, sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Kepulauan Nusantara. Sejak awal kolonisasi Portugis di awal abad ke-16, kemudian diikuti oleh Belanda pada abad ke-17 dan selanjutnya, banyak pujian yang dikemukakan tidak hanya oleh kalangan birokrat kolonial, tetapi juga oleh para ilmuwan yang berkunjung ke Bali. Dari kalangan birokrat Belanda, misalnya, Bali dianggap memproduksi para budak yang potensial, sehingga pada masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), Bali dianggap memiliki budak-budak yang tangguh.

Pada masa-masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan ketangguhan orang Bali ini sejajar dengan keberanian etnis-etnis lainnya seperti etnis Madura, Manado yang dimanfaatkan sebagai tentara oleh pemerintah kolonial Belanda. Bukan berarti, bahwa Belanda tidak hati-hati dengan orang Bali ini, karena sebagaimana yang dilakukan oleh orang Aceh yang dikenal dengan "Perang Syahid", maka di Bali pun dikenal dengan dilakukannya perang habis-habisan yang dikenal sebagai, "Puputan" ("*puput*" berarti berakhir). Idenya adalah sama yaitu mencapai kenirwanaaan, sebagai perwujudan akan ketidaksetujuan dan munculnya perlawanan

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Bagus (almarhum) adalah Guru Besar Antropologi di Universitas Udayana. Ia mendapat gelar doktornya dari Universitas Indonesia di Jakarta dan pernah belajar di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan di Universiteit te Leiden di Belanda. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra, Direktur Museum Bali di Denpasar, Kepala Lembaga Bahasa di Denpasar dan Direktur Proyek Baliologi Bali. Karya-karya berkisar masalah antropologi, bahasa, dan sastra termasuk di antaranya, "Raos Ngempelin: Suatu Bentuk Permainan Bahasa", dalam *Pacific Linguistics*, (1983), "Arti Dongeng Bali dalam Pendidikan", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1968), "Hubungan Patronase dalam Masyarakat Bali Dewasa ini", dalam *Bahasa-Sastra-Budaya: Ratna Manikam untai Persembahan kepada Prof. Dr.P. J. Zoetmulder*, (1985), "Kakawin Sutasoma dalam Seni Rupa", dalam *Punya: Cendera Mata untuk Professor Emeritus A. Teeuw*, (1987), dan "Dongeng Panji dalam Kesusastraan Bali", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1986). Lihat: Hildred Geertz, *State and Society in Bali*. Leiden KITLV Press, 1991.

sebagai akibat diterapkannya kebijakan Belanda yang menghegemoni wilayahnya. Meskipun demikian, perang habis-habisan terhadap Belanda itupun akhirnya dilancarkan, dimana Belanda dapat mengalahkan perlawanan masyarakat pribumi dan menandai kejatuhan kerajaan-kerajaan dan kesultanan di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20. Dinamika politik yang berkembang ketika India berhasil mengusir penjajah Inggris pada abad ke-19, maka ide-ide untuk memikirkan kebebasan dari penjajah itu juga muncul di kalangan masyarakat pribumi, sebagaimana dapat dilihat di wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Demikianlah ide-ide postkolonialisme sebagaimana dikembangkan oleh Edward Said yang muncul sebagai tanda kebangkitan bangsa-bangsa di dunia Timur terhadap hegemoni yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat.

Bali memang dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, namun tidaklah berarti, bahwa perjuangan Bali berakhir. Memang dari sudut pandang tentang kekuasaan tradisional di hadapan kekuasaan Belanda mengalami perubahan. Dengan kata lain, dari kekuasaan politik, memang penguasa tradisional mulai kehilangan kewenangan dan kontrol politik atas beberapa wilayahnya. Akan tetapi, dari sudut pandang sosial budaya masih tampak otoritas adat dan keagamaan yang masih dilakukannya. Meskipun dalam beberapa hal ketidakberhasilan tokoh adat dalam menghadapi Belanda, kemudian lebih banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, sebagaimana yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara (Ardhana, 2000).

Memang benar, jika ideologi agama dipergunakan sebagai jargon politik oleh elit-elit agama, maka Belanda tidak henti-hentinya untuk melenyapkannya. Namun, jika ideologi agama itu dipergunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah sosial budaya, yang dianggap tidak akan mengancam eksistensinya, maka pemerintah Belanda tidak terlalu menghiraukannya, dan membiarkannya sepanjang tidak mengganggu kenyamanannya. Di sinilah, pada umumnya terjadi di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya yang tampak mulai memainkan perannya dalam meningkatkan potensi sosial budaya yang berlandaskan adat dan budaya Bali dalam menghadapi kekuatan luar yang menghegemoni itu. Menarik untuk diungkapkan, misalnya bagaimana Zoetmulder dalam buku yang ditulisnya berjudul, *Kanglawan* (Zoetmulder, 1974: 43), yang menyebutkan, bahwa bagaimana naskah-naskah Jawa Kuno berhasil untuk diawetkan di Bali. Orang Bali, mampu untuk menjadikannya sumber fondasi bagi kebudayaannya untuk memperoleh inspirasi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) untuk dapat tetap bertahan, ketika berhadapan dengan pengaruh asing.

Meskipun demikian, tidak semua nilai-nilai tradisi lama dapat dipertahankan, karena Belanda beranggapan, bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan budak (*budak slavery*), tawan karang, dan mesatia untuk menyebutkan beberapa contohnya, dianggap bertentangan hak-hak azasi manusia di era modern. Hingga kini, Bali tampak secara intens mengandalkan potensi sosial budaya, adat, agamanya dan Belanda memberikan proteksi tentang hal tersebut yang dikenal dengan *Baliseering*, (sekarang sering disebut dengan, Balinisasi, Pembalian). Tatanan adat dan budaya ini kemudian yang dapat memperkuat identitas Bali itu (*cultural marker identities*), sehingga dirasakan manfaatnya dalam pengembangan kebudayaan Bali.

Ketika Bali berhasil ditundukkan oleh Belanda, mereka menyadari bagaimana ketangguhan dan keperkasaan rakyat Bali yang berperang dengan pasukan Belanda. Di satu pihak memang Belanda merasa puas, karena Bali dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia dapat ditaklukkannya dan disatukan di bawah kekuasaan mereka. Di lain pihak, mereka pun mengakui akan keunggulan yang dimiliki pejuang Bali, ketika berhadapan dengan senapan Belanda. Bagaimana pun juga, Belanda pun mencatat akan keperkasaan perjuangan Bali itu, dan Belanda pun ingin menciptakan Bali sebagai wilayah yang berbeda dengan keadaan sebelum pulau itu ditaklukkannya. Ini dirasakan, terutama setelah terjadinya pasifikasi "*Pax Neerlandica*", yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan kebijakan *rust en orde* (aman dan tertib). Bali pun dipromosikan sebagai "Pulau Surga", seperti Adrian Vickers menyebutnya sebagai, *Bali: A Paradise Created* (Vickers, 1989). Pengenalan Bali sebagai destinasi wisata oleh pemerintah kolonial Belanda sebenarnya sudah diawali ketika berakhirnya era ketidakmenentuan dinamika politik. Era baru pun dianggapnya sudah dimulai, dimana sejak tahun 1920-an, sudah didirikannya Bali Hotel, sebagai hotel yang pertama di Denpasar Bali.

Demikianlah perkembangan Denpasar sebagai sebuah pusat kerajaan tradisional yang dikenal sebagai Puri Denpasar, karena nama puri ini dilihat dari lokasinya yang berada di sebelah utara pasar (*Den*: berarti utara, *pasar* artinya pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan politik).<sup>4</sup> Menarik memang, melihat posisi Kota Denpasar ini, dimana masyarakat

---

<sup>4</sup> Semua kabupaten dan kota yang ada di Bali merupakan pusat-pusat kerajaan di masa lalu, terutama pada abad ke-19, yang sekarang menjadi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangsem, dan terakhir Kabupaten Badung yang sebenarnya pusat kerajaan Mengwi pada abad ke-17-ke-18 di Bali.

dan budaya orang Bali terlihat kental. Belanda pun mengembangkan kawasan Denpasar ini, terlihat dari ketika banyaknya tamu-tamu pemerintah yang berkunjung di Denpasar ini, maka banyak diantaranya yang diberikan penginapan di Bali Hotel ini. Di antaranya adalah Miguel Covarrubias yang lahir tahun 1904 di Kota Mexico, kemudian berhasil menerbitkan bukunya pada tahun 1937 yang terkenal dengan judul, *The Island of Bali*. Covarrubias adalah seorang seniman dan antropolog, dapat memahami tarian, theatre, musik, kerajinan, dan mencatat tentang agama, adat istiadat, kehidupan keluarga, organisasi ekonomi dan politik. Ia merasa beruntung pula, ketika berkenalan dengan seorang putra diplomat Jerman di Moscow-Russia yang bernama Walter Spies pada tahun 1923, yaitu tahun-tahun setelah meletusnya Perang Dunia I di Eropa (Covarrubias, 1937: xxi). Tidak hanya berhasil didatangkan wisatawan asing ke Bali, tetapi kebudayaan Bali diperkenalkan juga ke luar negeri yang dikenal dengan *Paris Colonial Exposition* yang dilaksanakan pada tahun 1931 (Pemda Gianyar, 2015: 16). Inilah awal perkembangan pariwisata di Denpasar pada khususnya, dan di Bali pada umumnya.

## **II. Bali sebagai Ladang Pengembangan Kebudayaan**

Tahun 1980, ketika berkuasanya rejim Orde Baru yang authoritarian dan sentralistis lebih dari 32 tahun merupakan masa pengembangan wisata Bali secara intens ke seluruh dunia. Kebijakan masa ini lebih mengedepankan kebijakan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas (Dahm, 1999: 245). Di Bali, dalam hal ini di Denpasar misalnya, jika sebelumnya, masih dilihat penggiat-penggiat wisata dalam skala kecil, yang berada di belakang Bali Hotel sebagai pusat penjualan souvenir dari barang-barang kerajinan kayu, emas dan perak, lukisan dan barang kerajinan lainnya. Namun, perkembangan kemudian, menunjukkan adanya pergeseran menuju sentra-sentra lainnya misalnya pindah ke pasar tradisional di Sukawati "Pasar Sukawati", di Kabupaten Gianyar. Dari saat itu, perkembangan pariwisata yang berskala kecil sudah mulai dirasakan pergeserannya ke pariwisata yang berskala besar. Ini terutama dirasakan sejak tahun 1980-an dengan dimulai pembangunan kawasan hotel di Nusa Dua, dan wilayah Jimbaran. Perkembangan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya mulai dirasakan ancamannya. Demikian pula dengan pengembangan konsep pariwisata massal (*mass tourism*), berakibat pada semakin terdesaknya kehidupan masyarakat lokal. Terlebih-lebih kemudian, dengan mulai maraknya pembangunan kawasan wisata seperti dibangunnya Bali Nirwana Resort (BNR) yang

ditengarai berdampak negatif terhadap alam lingkungan Bali yang asri dan sudah tersohor ke seluruh dunia.

Ini tentu sangat beralasan, bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang mengedepankan *mass tourism industry*, banyak menimbulkan pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat Bali. Dampak-dampak seperti tampak pada semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian persawahan yang beralih fungsi menjadi lahan untuk hunian dan investasi sehingga sangat sulit sekarang ini untuk menjumpai hamparan sawah yang terbentang dari Denpasar menuju Denpasar Selatan dan dari arah Denpasar menuju Denpasar Barat. Ke dua wilayah ini yaitu Denpasar Selatan dan Denpasar Barat mendapat imbas yang luar biasa dari perkembangan kawasan wisata di Bali Selatan ini. Tampaknya apa yang disuarakan oleh I Gusti Ngurah Bagus, tampaknya tidak banyak mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, sehingga berbagai permasalahan pembangunan manusia sudah di depan mata saat sekarang ini. Denpasar Selatan misalnya, yang mempunyai jarak yang dekat dengan kawasan Nusa Dua, tidak terkecuali telah mengalami perubahan yang drastis, demikian pula dengan kawasan Denpasar Selatan yang dekat dengan wilayah Kuta, Legian, dan Seminyak, tampak memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal yang pada awalnya memang berbasis pertanian.

Meskipun diakui bahwa, jika masyarakat lokal diwawancarai, maka sebagian dari mereka mengatakan, bahwa cukup puas akibat perkembangan dunia pariwisata, dimana jika dahulu dalam kaitannya dengan upacara atau ritual adat, mereka sendiri yang harus memanjat sendiri pohon kelapanya untuk mencari daun kelapa atau janur dan buah kelapa yang akan dipergunakan untuk membuat sesajen atau canang yang akan dipersembahkan kepada dewa-dewa kahyangan. Namun sekarang, mereka sendiri tidak perlu mencarinya sendiri, tetapi sudah langsung dapat membelinya di pasar setiap paginya. Ini menunjukkan, bahwa telah terjadi diversifikasi dalam lapangan pekerjaan yang sangat memudahkan mereka. Ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana sebuah perubahan telah terjadi. Bahkan, di beberapa wilayah yang dekat dengan kawasan wisata banyak yang mengeluh tentang terjadinya perubahan pemilikan tanah mereka yang harus dijual kepada pendatang atau bahkan kepada orang asing, melalui perantara penduduk lokal. Ini tentu adalah sebuah masalah penting, ketika berbicara tentang kajian budaya, dimana dalam konteks ini, apabila tanah-tanah dijual, maka dengan sendirinya mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai orang Bali. Karena bagaimana pun juga, tanah merupakan

sebuah identitas dimana berbagai aktifitas budaya dilakukan oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ketika masyarakat Bali mengalami titik puncak seperti ini, maka di sinilah muncul berbagai persoalan yang mulai menganggap, bahwa kajian budaya adalah sebuah konsep yang penting dikembangkan di Bali. Ini menjadi menarik, ketika diketahui, bahwa dalam proses atau dinamika sejarah yang panjang tampak berbagai pengaruh luar telah berpengaruh di Bali. Baik, pengaruh dari China, India, dan sebagainya tampak tidak luput dari perkembangan yang terjadi di Bali. Pengaruh kedua peradaban besar itu, memang masih dapat dilihat di Bali, dan kedua peradaban itu tampaknya tidak berhasil mengkolonisasi Bali. Hingga kini, hanya Bali adalah satu-satunya mozaik Hindu yang masih tersisa di Asia Tenggara. Meskipun Bali, mendapat pengaruh kuat dari kedua peradaban itu, misalnya dari China dimana dapat dilihat pada adanya pemujaan terhadap "Dewi Cina" di kompleks Pura Batur, tampaknya itu dalam proses sejarahnya tidaklah mendominasi kebudayaan Bali di masa selanjutnya. Demikian juga dengan adanya pengaruh India dalam kaitannya dengan penyebaran agama Hindu, tampaknya juga tidak terjadi proses Indianisasi pada kebudayaan Bali. Bahkan, bagi orang Bali adanya keinginan untuk tetap mempertahankan dan merevitalisasi kebudayaan mereka sendiri yang disebut dengan budaya Bali yang bersumber kuat pada masa tradisi prasejarah, sejarah klasik, sejarah modern, hingga post modern.

Di sinilah pentingnya melihat konteks pentingnya Bali dalam upaya mempertahankan tradisi budaya yang dianggap oleh mayoritas penduduk lokal sebagai kebudayaan mereka, di tengah-tengah terjadinya suatu perkembangan masyarakat yang mengglobal "*a globalized world*". Hal ini pula yang menyebabkan Universitas Udayana mengangkat pola ilmiah pokoknya (PIP) tentang kebudayaan. Ini artinya, bahwa semua fakultas yang ada di Universitas Udayana diharapkan memberikan perhatian pada masalah Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan. Dengan kata lain, tiap-tiap fakultas hendaknya memberikan porsi pada masalah kebudayaan dimana persoalan-persoalan filosofi, kearifan lokal tampaknya dapat dicari di masing-masing Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan itu. I Nyoman Suarka, dalam karyanya yang berjudul, "PIP Kebudayaan, Naskah Lontar, dan Fakultas: Relevansi dan Sistem Pendidikan Unggul Berbasis Kebudayaan", (Suarka, 2017: 25) mendeskripsikan sebagai berikut:

No.	Fakultas	Jenis dan Judul Lontar yang relevan
1	Fakultas Ilmu Budaya	Satwa, Kidung, Kakawin, Parwa, Babad, Geguritan, Kalpasastra, Sasana, Dasanama, Paribasa, T tutur/ Aji
2	Fakultas Kedokteran	Budakecapi, Dharmasada, Kalimosada, Kuranto Bolong, Usada Gering Agung, Kanda, Kawisesan, Kramaning Abrata, Panawar Gering, Tatakramaning wang angamong wong beling, Usada Kamatus, Rahasya Sanggama, Babacakan Tenung Lara, Tenung Edan, Tetenger, Penyakit Kacacar, Osadi/ tetamban, Mulaning Gering, Panglebur Gering, Patengeran Gering, Pangusadan, Parembon Sarab, Punggung Tiwas, Usada Rare, Usada Manak, Upas, Wong Gering tan waras, Usada Gede, Panawar, Pamugpug, Masa Tiwang, Smara Ratih, Smaragama, Geguritan Kesehatan
3	Fakultas Peternakan	Carcan Ayam, Carcan Meyong/ kucing, Carcan Kuda/Aswa, Carcan Paksi, Carcan Titiran, Pengayam-ayaman, Patempuraning ayam, Pratekaning Paksi, Tatempuran Sawung, Geguritan kedis
4	Fakultas Hukum	Kanda Hukum, Awig-awig, Kutaragama, Pangeling-eling, Pasukertan, Paswara, Plalonjor, Sima, Krama
5	Fakultas Teknik	Dharma laksana undagi, Dharmaning Astakosala, Dharmaning Astakosali, Kramaning Ngukur Karang Paumahan, Astadewa, Astabumi, Wiswakarma, Swakarma, Astapatali, Janantaka, Sikuting umah, Dewatatawa, Bhuanakretih, Kaputusan Sanghyang Anala, Purwa Bhumi Kamulan, Gong Besi, Pamiah Kala, Pamugpug Desti, Pangujanan, Sikut Karang Pamelaspas, Kaldening Besi, Tingkahang Karang Paumahan, Tingkahang Angwangun Kahyangan Dewa
6	Fakultas Pertanian	Dharma Pamaculan, Tutur Aji Pari, Wariga, Kaputusan Bhatara Sri, Aji Janantaka, Taru Pramana, Kerti Bhuwana, Usada Sawah, Kala Gumantung, Pratingkahing Wong Magaga Sawah, Bhamakretih
7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dharma Pangolih, Dharma Pangadolan, Tutur Srigati, Wariga
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Cetik, Pamunah, panawar, Panebasan, Panerang, Pangancingan, Pangujanan, Tetamban, Usada, Upas, Rukminiatwa, Taru Pramana, Wariga
9	Fakultas Kedokteran Hewan	Usada Sato, Carcan Ayam, Carcan meyong/ kucing, Carcan Kuda/Aswa siksa, Carcan Paksi, Carcan Titiran, Carcan banteng, Pangayam-ayaman,

		Patempuraning Ayam, Pratekaning Paksi, Tatempan Sawung
10	Fakultas Teknologi Pertanian	Dharma Caruban, Wariga, Kaputusan Bhatara Sri, Aji Janantaka, Taru Pramana, Kerti Bhuwana, Usada Sawah, Kala Gumantung, Pratingkahing Wong Megaga Sawah, Bhamakreth
11	Fakultas Pariwisata	Sasana, Babad, Satwa, Kidung, Kakawin, Parwa, Babad, Geguritan, Astakosala, Astakosali, Wariga
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Kumandaka, Rajaniti, Bagawan Kamandaka, Tantri Kamandaka, Nitisastra, Nitipraya, Nitorisora
13	Fakultas Kelautan	Segarakreth, Carcan Mina

Dari deskripsi tabel di atas dapat dilihat, bagaimana misalnya di Fakultas Kedokteran sudah berkembang upaya untuk melihat masalah-masalah tradisi budaya pengobatan tradisional yang banyak bersumber pada lontar-lontar yang disebut dengan *lontar Usada*. Bahkan, sebagai catatan banyak mahasiswa dari Malaysia yang belajar studi lanjut di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berkaitan dengan studi-studi penyakit tropis yang tampaknya tidak banyak dikembangkan di negeri-negeri bermusim dingin seperti di Eropa. Hal ini tentu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan studi-studi ilmu kedokteran yang sebenarnya sudah tampak ada materinya di naskah-naskah tradisional. Ini mengisyaratkan, bagaimana masalah-masalah sosial budaya penting untuk dikaji dalam konteks perkembangan ilmu-ilmu eksak seperti yang terdapat di Fakultas Kedokteran. Demikian pula pada Fakultas Teknik bidang kajian arsitektur juga sudah mulai menggali masalah-masalah kebudayaan yang bersumber pada lontar yang disebut *Asta Kosala Kosali*, yang menyangkut masalah aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pembangunan bangunan yang memiliki arsitektur tradisional di Bali. Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan bukan hanya merupakan kekhasan yang tidak realistis, tetapi dalam kenyataannya memang sudah diaplikasikan di masing-masing fakultas. Dengan berkembangnya kajian-kajian ini, tentu akan mengangkat studi Kajian Budaya yang dapat dipergunakan oleh para *stakeholders* untuk kepentingan teoretis dan praktis di masyarakat, tidak hanya di Bali pada khususnya, tetapi juga di Indonesia pada umumnya.

Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat lokal dapat mempertahankan dan merevitalisasi apa yang dimilikinya sebagai asset sosial budaya itu (*social and cultural assets*)? Tentu, pertanyaan ini, tidak hanya muncul di Bali sendiri, tetapi juga muncul di masyarakat lainnya yang menginginkan tetap utuhnya tradisi budaya yang sudah dimilikinya itu secara turun temurun. Dengan demikian diharapkan, bahwa tradisi budaya yang sudah dimilikinya itu, tidak

hanya berlaku di tempat mereka sendiri sebagai *best practices*, tetapi hendaknya mampu diangkat ke skala yang lebih luas atau nasional. Dengan pemikiran seperti ini, nilai-nilai tradisi budaya yang dimiliki masyarakat lokal tidaklah secara terus menerus menerima inovasi atau pembaharuan dari luar, tetapi sebaliknya diharapkan, bahwa kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat disumbangkan bagi masyarakat lainnya memperkuat kearifan nasional dan bahkan, dapat berkontribusi pada kearifan universal (*universal outstanding values*). Untuk Bali, kali ini sudah dapat memberikan kontribusinya pada pemahaman tentang *subak* (pengairan persawahan tradisional Bali) yang sudah diakui oleh UNESCO, dan konsep *Tri Hita Karana* yaitu keseimbangan antara kehidupan manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya.

### **III. Perubahan dari *Inward Looking* ke *Outward Looking***

Yogya dan Bali adalah dua propinsi diantara propinsi yang lainnya seperti Sumatra Barat, Aceh, dan Papua untuk menyebutkan beberapa contoh di Indonesia yang sangat kental dengan kajian-kajian kebudayaannya. Tidak mengherankan jika wisatawan kalau ke Indonesia, tentu dua propinsi Yogya dan Bali menjadi target kunjungannya. Ini adalah sangat relevan dengan upaya mengembangkan Program Kajian Budaya di kedua propinsi itu.

Di Universitas Udayana Bali, dikenal dengan Kajian Budaya dan di Universitas Gajah Mada Yogya, dikenal dengan program Kajian Budaya dan Media. Apabila dilihat dari substansi atau *content* yang dibahas di kedua program ini tampaknya tidak jauh berbeda. Tidak hanya mahasiswa dalam negeri yang menarik Program Kajian Budaya ini, misalnya dari Sulawesi, Papua, yang mengajukan topik disertasinya berdasarkan dari mana asal mereka. Bahkan, mahasiswa asing sudah ada yang menyelesaikan programnya di kajian budaya ini. Mahasiswa asing yang belajar tentang kajian budaya ini berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Finlandia untuk menyebutkan beberapa contohnya. Yang menarik untuk diungkapkan adalah bahwa mereka belajar tentang kajian budaya, dimana disertasi yang ditulis juga berkaitan dengan persoalan-persoalan budaya Bali dan Maluku, dan bukan mengenai daerahnya masing-masing. Di sini tampak, bahwa mereka umumnya sudah bisa berbahasa Indonesia secara memadai. Oleh karena itu, yang dipentingkan adalah penguasaan substansi atau *content* dari studi kajian budaya yang diajarkan di Universitas Udayana. Dalam hal ini, memang pemahaman bahasa penting sebagai "alat" untuk mempelajari substansi kebudayaan yang diinginkan untuk dipelajarinya.

Namun demikian, *stressing* yang dipentingkan adalah bagaimana mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari kebudayaannya. Terlebih-lebih pada perkembangan akhir-akhir ini, Pulau Bali dipromosikan sebagai "*the best island*", karena potensi budaya dan keindahan alam yang dimilikinya. Ini tentu akan memberikan konsekuensi-konsekuensi tersendiri terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang semakin terhegemoni, termarginalisasi ketika berhadapan dengan kebudayaan lain yang lebih dominan. Dengan demikian studi tentang budaya dan masyarakat di Bali dan Yogya yang memiliki kebudayaan lokal yang khas, menjadi menarik di kalangan peneliti asing. Tidak ada alasan yang jelas, mengapa mereka mempelajari Bali atau Yogya, padahal di luar Bali masih banyak daerah-daerah yang memiliki kekhasan dan keunikan budaya yang menarik untuk dikaji untuk perkembangan ilmu pengetahuan kemanusiaan dan kebudayaan.

Di sini tampak, bahwa Kajian Budaya masih belum secara maksimal mengembangkan kajian-kajian kebudayaan yang memungkinkan mahasiswa mengkaji bukan daerahnya sendiri. Tampaknya dalam kajian budaya perlu dikedepankan seminar kajian budaya yang lebih menitik pada persoalan-persoalan kebudayaan Indonesia tidak hanya dari daerahnya sendiri, tetapi sudah mengubah *mindset*nya untuk berusaha mempelajari kebudayaan dari daerah lainnya di Indonesia (dari *inward Looking* ke *outward Looking*). Oleh karena itu, betapa pentingnya mengadakan kerjasama yang sifatnya kolaborasi untuk membahas persoalan-persoalan ini, dalam upaya lebih memberikan ruang yang lebih luas tentang kajian budaya di Indonesia.

#### **IV. Kajian Budaya dalam Konteks Pembangunan Kabupaten dan Kota: Perspektif Masa Depan**

Topik-topik kajian budaya yang dapat dikembangkan, sebenarnya cukup banyak, variatif, dan luas. Namun, kekhawatiran mahasiswa akan terbatasnya sumber menjadi alasan utamanya. Keterbatasan sumber yang terjadi ini sebenarnya merupakan warisan masa lalu. Ini dapat dilihat, bagaimana ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda terlalu memusatkan kekuasaannya di Indonesia Barat dan kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan di Indonesia Timur. Oleh karena itu, muncul konsep *inner Indonesia* dan *outer Indonesia* (cf. Ardhana, 2017b: 226).

Inilah ketimpangan yang terjadi atau gap antara kedua wilayah itu, dimana Sumatra, Jawa dan Bali banyak mendapat perhatian, sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara

dan Papua mendapat perhatian yang terbatas. Sebagaimana diketahui, bahwa arah pengembangan kajian budaya ini adalah mencakup kajian kebudayaan yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks ini perlunya mempunyai sumberdaya manusia yang mengetahui wawasan luas tentang wilayah-wilayah tersebut (Lihat misalnya: Leushuis, 2014). Dalam jangka pendek tampaknya mengalami kesulitan untuk mewujudkannya, dan diperlukan beberapa waktu untuk melangkah ke sana. Saat ini, perlu ditanamkan bagaimana dengan mempelajari daerah lain sebenarnya memiliki manfaat yang banyak sebagai sebuah *lesson learnt*. Ini dimaksudkan, bahwa bagaimana mempelajari kebudayaan daerah-daerah lainnya dalam konteks untuk memahami perbedaan kebudayaan yang dimiliki dan juga merelasikannya hubungan-hubungan itu secara lebih baik. Studi-studi yang komparatif dan komprehensif sangat diperlukan dalam upaya memahami kebudayaan Indonesia yang luas itu, yang memiliki berbagai keunggulan, kekhasan dan keunikan budaya.

Hingga saat ini, mahasiswa masih terpaku dengan teori-teori besar (*the great theories*). Padahal dalam kajian budaya yang mengedepankan pendekatan *bottom up*, bukan *top down*, sangat diperlukan kemampuan kritik yang jelas, dan kemampuan untuk merumuskan dan menganalisis persoalan-persoalan secara ilmiah. Terlalu terpaku dengan teori-teori besar dan kurang mampu mengangkat kemampuan analisis inilah yang menjadi masalah dalam kajian budaya ini. Selain itu, biasanya mahasiswa kurang mau mengadakan penelitian yang intensif, sehingga analisisnya juga tampak kurang mendalam. Penggunaan kerangka teori seringkali masih merupakan pajangan, dan bukan dari hasil konstruksi dari apa yang sudah diperoleh di lapangan penelitian. Selain itu, hasil-hasil kajian budaya selama ini, masih kurang dipergunakan oleh *stakeholders* seperti pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan masyarakat lokal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakannya. Ini tampaknya menjadi kendala, dalam mengembangkan kajian budaya yang bersinergi dengan berbagai pihak terutama para *stakeholders*, sehingga apa hasil penelitian itu dapat dijadikan acuan dalam rumusan-rumusan kebijakan yang akan diambilnya. Aspek-aspek ini perlu dielaborasi lebih jauh, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan dan rasa kebahagiaan mereka. Kajian Budaya banyak diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan ini (Wija, 2017 dan cf. Ardhana, 2013: 33—34). Inilah tantangan yang hendaknya diatasi untuk melangkah menuju pengembangan kajian budaya di masa depan.

Di beberapa daerah seringkali, ketika berbicara tentang pariwisata hendaknya menengok ke Bali dahulu. Seolah-olah, apabila mengembangkan industri pariwisata melihat dan mengerti apa yang dikerjakan di Bali. Hal ini tentu tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah, bahwa masing-masing daerah sudah memiliki kebudayaan yang memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Tidak perlu meniru atau memindahkan model yang dikembangkan di Bali ke daerah-daerah lainnya. Ini sangat penting mengingat tiap daerah memiliki keunggulan budayanya sendiri (*best practices*) yang perlu digali dan dikemas, sehingga dapat menarik perhatian wisatawan asing untuk berkunjung ke daerahnya (*Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende*. 2014).

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat lokal sangatlah perlu bersinergi dalam mengembangkan daerah destinasi wisata yang akan dikembangkannya itu. Saat ini, tidak banyak pemerintah daerah yang memberikan perhatian maksimal terhadap masalah-masalah kebudayaan lokalnya, sehingga tampak mencari-cari konsep untuk dapat mengembangkannya. Jika konsep itu sudah dimiliki sebenarnya perlu upaya untuk menciptakan desain-desain baru dengan dukungan kreatifitas dan inovasi. Dalam konteks kreatifitas dan inovasi tampaknya tidak banyak yang memahami, karena kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya. Bagi daerah tertentu yang memiliki keunggulan ini, tentu diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini sangatlah penting dalam konteks kajian budaya, agar budaya lokal itu dapat bersaing secara kompetitif dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya di dunia.

Tidak banyak memang pemerintah daerah yang memberikan perhatian terhadap permasalahan budaya lokal ini, dalam konteks keikutsertaan mereka menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kabupaten dan kota di Indonesia yang tidak menjadi anggota dari JKPI itu, yang sudah didirikan pada tahun 2000-an, sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat. Selain, JKPI, terdapat pula Balai Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) yang juga merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam pengembangan sebuah kabupaten dan kota. Tugas utamanya adalah membantu pemerintah daerah dalam merevitalisasi kebudayaan lokalnya. Dalam hal ini BPPI juga memberikan peran memfasilitasi untuk mendaftarkan kabupaten dan kota untuk didaftarkan pusaka-pusaka yang dimilikinya itu ke lembaga internasional seperti UNESCO. Kedua badan swadaya masyarakat ini merupakan sebuah gerakan (*cultural movement*) dalam konteks sebagai

penggiat kota pusaka. Di satu pihak, memang tampak keinginan untuk melestarikan budaya lokal dari sebuah kabupaten dan kota, diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat lokal dalam perkembangan dan keberlanjutan kebudayaan daerahnya. Sementara di lain pihak, konsep-konsep besar seperti ide tentang *megacities*, megapolis atau megapolitan tampaknya menjadi kecenderungan yang muncul akhir-akhir ini, terutama di kota-kota besar. Jakarta misalnya secara keseluruhan, lebih mengembangkan konsep *megacity*, meskipun di beberapa wilayah seperti wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat sudah menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia itu (Ardhana, 2017a).

Walaupun tidak disadari, siapa dan pihak mana yang akan diuntungkan dengan konsep besar ini. Pengaruh globalisasi memang cenderung mengurangi adanya sekat-sekat antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam konteks negara, tampak semakin rapuhnya sekat-sekat itu (*a borderless society*). Ini berarti, perlunya segera membuat *grand design*, *blueprint*, *roadmap* pembangunan sebuah kabupaten dan kota (Lihat: *Roadmap Akselerasi*, 2013), sehingga apa pun konsep yang akan dikembangkan akan tetap memproteksi, merevitalisasi dan memberdayakan masyarakat lokal tersebut. Hal ini perlu dilaksanakan dalam upaya mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penyeragaman terhadap sebuah kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota hendaknya mampu mengangkat keunggulan budaya yang dimilikinya yang menjadi karakter dan kekhasan dari setiap kota. Tidak mengherankan pula, mengapa tiap-tiap kabupaten dan kota sudah mulai menggaungkan pembuatan sebuah *branding* yang diperuntukkan untuk sebuah kabupaten dan kota. Ini adalah sangat penting dalam upaya pembertahanan sebuah kabupaten dan kota yang memiliki identitasnya, sehingga tidak akan mudah tergerus dari berbagai dampak dari modernisasi atau globalisasi yang berlangsung sangat cepat.

Secara konsep upaya ke arah ini disebut dengan *smart city*, dimana sebuah kabupaten dan kota disebut cerdas, jika pemerintah daerah, penguasa lokalnya, dan masyarakat lokalnya mampu memanfaatkan budaya atau kearifan lokalnya untuk menuju kesejahteraan warga kabupaten dan warga kotanya (Ardhana, 2014). Ini menyangkut misalnya bagaimana masalah nilai-nilai kearifan, pakaian tradisionalnya, arsitektur tradisionalnya, gastronomi atau *culinair* tradisionalnya, dan tarian tradisionalnya dapat diupayakan untuk bertahan dalam perkembangan zaman. Hal ini tampaknya dapat dilakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah sejak diperkenalkannya undang-undang ini pada tahun 2001.

Ini dapat dibayangkan, begitu banyaknya terjadi wilayah untuk kabupaten dan kota, dimana peran tokoh-tokoh lokal yang dikenal sebagai "putra daerah" (*son of the soil*) menjadi sorotan di kalangan elit local dalam berkontestasi dalam dinamika politik local. Hal ini akan menjadi kajian-kajian yang menarik dari sudut pandang kajian budaya. Adanya pemekaran dan semakin kompleksnya dampak akibat globalisasi, menyebabkan perlunya ahli-ahli kajian budaya untuk berperan serta di daerah masing-masing untuk melakukan kajian-kajian, dan tentu dari kajian itu diharapkan adanya *output* berupa rumusan rekomendasi, buku acuan dan referensi, atau publikasi di tingkat nasional dan internasional bagi penggiat kajian budaya ini. Di beberapa daerah sudah dikembangkannya masalah museum daerah yang berkaitan dengan masalah revitalisasi aspek pertanian, kehutanan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Demikian pula telah terjadi pula dengan adanya keinginan untuk mengembangkan adanya museum desa adat, karena ada anggapan bahwa desa adat memiliki peran penting di samping museum pertanian atau museum subak itu. Akan tetapi, masalah pengembangan kebudayaan local di kabupaten dan kota atau tingkat propinsi masih menghadapi kendala, terutama sampai sekarang belum disahkannya tentang apa yang disebut dengan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Tampak kurang lebih 20 tahun sudah sejak Undang-undang itu digulirkan masih saja belum disahkannya.

Meskipun demikian, mengungkap persoalan kebudayaan local di masing-masing kabupaten dan kota di sebuah wilayah, diperlukan adanya peran aktif dari ilmuwan kajian budaya yang berasal dari latar belakang disiplin keilmuan yang beragam, yang hendaknya memahami secara baik, bagaimana pendekatan *interdisciplinary approaches* itu diaplikasikan. Pemahaman tentang konsep pluralisme, multibudaya, transbudaya dan sebagainya diharapkan akan menambah wawasan berpikir ilmuwan kajian budaya dalam mengkaji berbagai persoalan di setiap kabupaten, kota, propinsi atau di tingkat negara. Di sinilah pentingnya pertemuan seperti seminar, lokakarya, *focus group discussion*, penelitian atau bahkan, pengabdian masyarakat. Ini penting pula dilakukan dalam konteks menjangkau berbagai informasi yang dapat diangkat ke permukaan, sehingga ahli-ahli kajian budaya akan dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan manusia dan kebudayaan.

## V. Simpulan

Dari pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat pandangan yang melihat betapa signifikansinya pengidentifikasian wilayah kabupaten dan kota yang hendaknya mampu

mengangkat masing-masing budaya lokalnya. Pengangkatan ke permukaan masing-masing identitas lokal ini hendaknya mampu memperkuat daya saing kebudayaan lokal sebagai sebuah kabupaten dan kota tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

Untuk itu, kajian budaya memiliki peran penting, dimana para ahli kajian budaya (*culturalists*) hendaknya mampu membantu masing-masing kabupaten dan kota di masing-masing wilayah di Indonesia dengan tidak mempergunakan asset-asset sosial budaya untuk kepentingan politik semata, tetapi memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Terlebih-lebih lagi diharapkan, untuk tidak terjebak ke dalam kepentingan-kepentingan besar yang berada di balik promosi potensi-potensi sosial budaya. Dengan antisipasi terhadap berbagai masalah ini, diharapkan pembangunan kabupaten dan kota akan memiliki arah, orientasi yang jelas untuk pengembangan wilayahnya secara berkelanjutan (*sustainable development*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut (ed.). 2017a. "Understanding the Role of Public Historians in the Context of Smart Heritage Cities: Challenges and Responses". Paper presented at the International Workshop held by SEASREP Foundation (Southeast Asian Studies Exchange Program), in Bangkok, 29—30 March.
- Ardhana, I Ketut (ed.). 2017b. "Johannis Haba: Antropolog Dari Timor hingga Asia", dalam Robert Siburian (ed.). *Beta Orang Kupang: Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ardhana, I Ketut. 2016. "Menengok Gianyar sebagai Kota Pusaka Budaya", dalam *Pusaka Budaya (Majalah Pelestarian Kota Pusaka Gianyar, Bali)*. Edisi 03. Gianyar: Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Ardhana, I Ketut (ed.). 2014. *Denpasar Smart Heritage City: Sinergi Budaya Lokal, Nasional dan Universal*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.
- Ardhana, I Ketut. 2013. "Kritik Kajian Budaya Terhadap Ilmu-ilmu Positivistik: Dari Pemikiran Filsafat Ilmu Hingga Teori Kajian Budaya", dalam *Jurnal Kajian Budaya*. Volume: 09, Nomor: 17. Denpasar: Program S2 dan S3 Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonial Herrschaft 1915 bis 1950*. Passau: Sudostasienkunde-Philosophische Fakultät Universität Passau.
- Covarrubias, Miguel. 1937. *The Island of Bali*. London and New York: KPI.

- Dahm, Bernhard. 1999. "Indonesia", dalam *Sudostasien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. Munchen: CH Beck Verlag.
- Geertz, Hildred. 1991. *State and Society in Bali*. Leiden: KITLV Press.
- Leushuis, Emile. 2014. *Panduan Jelajah Kota-kota Pusaka di Indonesia: Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang*. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI).
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2015. *Penghargaan Parama Bhakti Pariwisata*. Gianyar: Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende*. 2014. Ende Nusa Tenggara Timur: Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende dan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.
- Roadmap Akselerasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013—2017 Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggulan*. 2013. Denpasar: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar bekerjasama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.
- Suarka, I Nyoman. (et. Al). 2016. *Prabhajana: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana*. Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan UPT Lontar Universitas Udayana.
- Vickers, Adrian. 1989. *Bali: A Paradise Created*. Singapore and Malaysia: Berkeley Books, Pte. Ltd.
- Wija, I Gde. 2017. *Kapita Selekta Kajian Budaya: Menemukan Landasan Bersama Pengembangan Program Kajian Budaya Universitas Udayana: Suatu Gagasan Awal*. Denpasar: Udayana Press.
- Zoetmulder, P. J. 1974. *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Jambatan.